

PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
Public Financial Management Multi Donor Trust Fund III (PFM MDTF III)

**Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan terkait
Program Penanganan Stunting**

**Komponen II: Kebijakan dan Manajemen Pengeluaran,
Subkomponen 1: Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran (RETF) [TF – 0B5420]**

No. 03/UKPBJ.ST343/01.02/11/2023

PP No. 17 tahun 2017 mengamanatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan program (money follow program). Pendekatan ini mengharuskan adanya penyelarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap pemangku kepentingan, termasuk diantaranya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi program dan kegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas dan pembangunan nasional, serta orkestrasi penyusunan perencanaan antara proyek yang akan dilaksanakan, pendanaan, dan aspek kewilayahan. Pada kenyataannya sampai saat ini sinergi perencanaan antara pusat dan daerah masih belum terimplementasi dengan baik yang dapat menghambat pencapaian prioritas pembangunan, termasuk pembangunan wilayah. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya kebermanfaatannya yang dirasakan dari pelaksanaan pembangunan. Sinergi perencanaan pusat dan daerah menjadi sangat penting, sehingga pembangunan dan pengembangan menjadi lebih terarah dan sejalan antara pusat dan daerah, serta dapat menciptakan kesinambungan dan kohesi dalam pembangunan wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada PFM MDTF III tahun 2023 ini, Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan mengajukan kegiatan terkait sub komponen I: Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran. Kegiatan ini akan diharapkan dapat menghasilkan masukan terhadap rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan untuk memuat analisis lintas sektor dan lintas wilayah yang diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas perencanaan pembangunan, termasuk analisis mendalam terkait tahapan proyek dan pendanaannya. Selain itu, akan ada identifikasi dukungan yang dibutuhkan untuk keberhasilan suatu proyek dari pusat, daerah, dan pihak lain. Hal ini akan erat kaitannya dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja di tengah ketatnya kondisi APBN saat ini.

Stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanganan stunting termasuk Major Project atau Proyek Prioritas Strategis yang wajib dituntaskan. Targetnya, angka kematian ibu turun hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga prevalensi dapat dipangkas menjadi 14%. Namun pada implementasinya, Major Project ini terbentur beragam masalah. Pelaksanaan program penanganan stunting tidak sesuai dengan yang direncanakan. Banyak proyek atau kegiatan yang sudah direncanakan, tidak terlaksana dengan baik. Salah satu permasalahan penanganan stunting disinggung pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 berkaitan dengan perencanaan program di daerah, yaitu alokasi APBD di salah satu daerah untuk stunting sebesar Rp10 M tidak digunakan secara efektif. Hanya 20% dari anggaran tersebut yang dialokasikan untuk intervensi spesifik terkait peningkatan gizi dengan pemberian bantuan makanan seperti telur, daging, ikan, dan sayur. Sedangkan 80% dari anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat koordinasi.

Sehubungan itu dan penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, melalui hibah PFM MDTF III pada tahun 2023 diperlukan satu konsultan senior untuk melakukan tinjauan dan analisis mendalam pada efektivitas perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan program penanganan stunting, serta menyusun rekomendasi kebijakannya sebagai salah satu bahan masukan dalam RPJMN 2025 – 2029, dengan kualifikasi sebagai berikut:

**1. Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan terkait Program Penanganan Stunting
(KODE : SENIOR SINERGI STUNTING)**

Tugas ini akan diberikan kepada konsultan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Minimal pendidikan Magister (S2) di bidang Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Publik Bidang Kesehatan, atau yang terkait;
- Minimal memiliki pengalaman selama 8 tahun secara profesional atau gabungan antara pengalaman kerja dan pendidikan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan public dan diutamakan yang berpengalaman di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.
- Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kepemimpinan, bekerja dengan beberapa tim dari berbagai sektor, mendiagnosis masalah, dan menganalisis kebijakan;
- Terampil dan terstruktur dalam menulis dan melakukan presentasi dengan kemampuan untuk menyusun laporan, catatan kebijakan, dan presentasi; serta
- Memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan pemerintah pusat dan daerah, serta kelembagaan internasional dan mengoordinasikan tim dalam pemerintahan untuk melakukan berbagai pengalaman dengan negara lain.

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung yang terdiri dari:

1. Dokumen Administrasi, Teknis dan Biaya (form terlampir).
2. Copy ijazah dan transkrip nilai.
3. Bukti pembayaran pajak.
4. Refrensi/Bukti kontrak.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan data dukung tersebut.

Mohon mencantumkan kode posisi yang akan di lamar.

Paling lambat **6 November 2023 pukul 17.00 WIB**, ditujukan kepada :

Pokja VII Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PPN/Bappenas

e-mail : ulp@bappenas.go.id

Jakarta, 2 November 2023

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

A. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASI

CONTOH

Nomor : _____
Lampiran : _____

_____ , _____ 20__

Kepada Yth.:
Pokja Unit Kerja Pengadaan Baran dan Jasa
di

Perihal: Penawaran Administrasi _____ *[nama pekerjaan diisi oleh Penyedia]*

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Nomor _____ tanggal _____ dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi untuk pekerjaan _____ *[diisi oleh Penyedia]* dengan Total Penawaran Biaya sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 4 Desember 2023.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Penawaran Administrasi ini kami lampirkan :

1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
 - 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
 - 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
 - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Jadwal penugasan tenaga ahli;
 - b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
2. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Penawaran Biaya
3. Data Kualifikasi, dan
4. *[Dokumen lain yang dipersyaratkan]*

Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

B. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI¹

CONTOH

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Nama Tenaga Ahli	Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) ²												Orang Bulan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			n
1																
2																
n																
Total																

Masukan Penuh-WaktuMasukan Paruh-Waktu

¹ Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

² Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

C. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI

	Daftar Riwayat Hidup	C O N T O H
1. Posisi yang diusulkan	: _____	
2. Nama Tenaga Ahli	: _____	
3. Tempat/Tanggal Lahir	: _____	
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah)	: _____	
5. Pendidikan Non Formal	: _____	
6. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia	: _____	
7. Pengalaman Kerja ¹		
Tahun ini _____		
a. Nama Pekerjaan	: _____	
b. Lokasi Pekerjaan	: _____	
c. Pengguna Jasa	: _____	
d. Uraian Tugas	: _____	
e. Waktu Pelaksanaan bulan tahun)	: (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal	
f. Posisi Penugasan	: _____	
g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: _____	
Tahun sebelumnya		
a. Nama Pekerjaan	: _____	
b. Lokasi Pekerjaan	: _____	
c. Pengguna Jasa	: _____	
d. Uraian Tugas	: _____	
e. Waktu Pelaksanaan bulan tahun)	: (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal	
f. Posisi Penugasan	: _____	
g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: _____	
dst.		

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

_____, _____ 20__
Yang membuat pernyataan

(_____) [nama jelas]

¹ Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, _____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN PENAWARAN
BIAYA

E. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	_____
	Sub-total	_____
	Total	_____
Terbilang: _____		

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Public Financial Management Multi Donor Trust Fund III (PFM MDTF III)

Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan terkait Program Penanganan Stunting

Komponen II: Kebijakan dan Manajemen Pengeluaran,
Subkomponen 1: Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran (RETF) [TF – 0B5420]

A. LATAR BELAKANG

PP No. 17 tahun 2017 mengamanatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan program (*money follow program*). Pendekatan ini mengharuskan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap pemangku kepentingan, termasuk diantaranya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi program dan kegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas dan pembangunan nasional, serta orkestrasi penyusunan perencanaan antara proyek yang akan dilaksanakan, pendanaan, dan aspek kewilayahan.

Pada kenyataannya sampai saat ini sinergi perencanaan antara pusat dan daerah masih belum terimplementasi dengan baik yang dapat menghambat pencapaian prioritas pembangunan, termasuk pembangunan wilayah. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya kebermanfaatan yang dirasakan dari pelaksanaan pembangunan. Sinergi perencanaan pusat dan daerah menjadi sangat penting, sehingga pembangunan dan pengembangan menjadi lebih terarah dan sejalan antara pusat dan daerah, serta dapat menciptakan kesinambungan dan kohesi dalam pembangunan wilayah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada PFM MDTF III tahun 2023 ini, Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan mengajukan kegiatan terkait sub komponen I: Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran. Kegiatan ini akan diharapkan dapat menghasilkan masukan terhadap rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan untuk memuat analisis lintas sektor dan lintas wilayah yang diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas perencanaan pembangunan, termasuk analisis mendalam terkait tahapan proyek dan pendanaannya. Selain itu, akan ada identifikasi dukungan yang dibutuhkan untuk keberhasilan suatu proyek dari pusat, daerah, dan pihak lain. Hal ini akan erat kaitannya dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja di tengah ketatnya kondisi APBN saat ini.

Stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanganan stunting termasuk *Major Project* atau Proyek Prioritas Strategis yang wajib dituntaskan. Targetnya, angka kematian ibu turun hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga prevalensi dapat dipangkas menjadi 14%. Namun pada implementasinya, *Major Project* ini terbentur beragam masalah. Pelaksanaan program penanganan stunting tidak sesuai dengan yang direncanakan. Banyak proyek atau kegiatan yang sudah direncanakan, tidak terlaksana dengan baik.

Salah satu permasalahan penanganan stunting disinggung pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 berkaitan dengan perencanaan program di daerah, yaitu alokasi APBD di salah satu daerah untuk stunting sebesar Rp10 M tidak digunakan secara efektif. Hanya 20% dari anggaran tersebut yang dialokasikan untuk intervensi spesifik terkait peningkatan gizi dengan pemberian bantuan makanan seperti telur, daging, ikan, dan sayur. Sedangkan 80% dari anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat koordinasi.

Sehubungan itu dan penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, melalui hibah PFM MDTF III pada tahun 2023 diperlukan satu konsultan senior untuk melakukan tinjauan dan analisis mendalam pada efektivitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanganan stunting, serta menyusun rekomendasi kebijakannya sebagai salah satu bahan masukan dalam RPJMN 2025 – 2029.

B. RUANG LINGKUP

Konsultan akan tinjauan dan analisis mendalam pada efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran serta sinergi pelaksanaan antara pusat dan daerah berkaitan dengan program penanganan stunting, kemudian menyusun rekomendasi kebijakannya. Konsultan diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program stunting secara ideal dan penerapannya di Indonesia.

Selain itu, konsultan melakukan pengumpulan data dan informasi dalam kunjungan lapangan terkait pelaksanaan program penanganan stunting. Konsultan harus menganalisa data dan temuan untuk menghasilkan 1 *main paper*. Topik spesifik yang akan dibahas berdasarkan pada isu pembangunan dan kebijakan yang berkembang. Indikasi topik dari kajian yang akan ditulis adalah sebagai berikut:

Topik*
Main Paper
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Stunting (<i>Analysis of the Effectiveness of the Implementation of the Stunting Program</i>)

*) Topik tentatif (dapat disesuaikan sesuai dengan isu yang berkembang)

Konsultan juga akan membantu tim Kementerian PPN/Bappenas dalam hal koordinasi antarpihak terkait, seperti Sektor Bappenas, K/L terkait, serta pemerintah daerah.

C. KELUARAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil kerja yang dilakukan oleh Konsultan akan ditinjau oleh Tim Bappenas dan akan terdiri dari namun tidak terbatas pada:

- 1 *main paper*, termasuk laporan dan paparan yang menjadi keluaran dari kegiatan ini yang berkaitan dengan hasil tinjauan dan analisis mendalam pada efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran serta sinergi pelaksanaan antara pusat dan daerah berkaitan dengan program penanganan stunting, serta menyusun rekomendasi kebijakannya.
- Laporan kunjungan lapangan yang akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk melengkapi kajian yang disusun.

D. KUALIFIKASI

Tugas ini akan diberikan kepada konsultan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Minimal pendidikan Magister (S2) di bidang Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Publik Bidang Kesehatan, atau yang terkait;
- Minimal memiliki pengalaman selama 8 tahun secara profesional atau gabungan antara pengalaman kerja dan pendidikan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan public dan diutamakan yang berpengalaman di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.
- Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kepemimpinan, bekerja dengan beberapa tim dari berbagai sektor, mendiagnosis masalah, dan menganalisis kebijakan;
- Terampil dan terstruktur dalam menulis dan melakukan presentasi dengan kemampuan untuk menyusun laporan, catatan kebijakan, dan presentasi; serta
- Memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan pemerintah pusat dan daerah, serta kelembagaan internasional dan mengoordinasikan tim dalam pemerintahan untuk melakukan berbagi pengalaman dengan negara lain.

E. PERIODE PENUGASAN

Konsultan senior akan melakukan penugasannya dengan metode *lump-sum* dimulai November hingga Desember 2023. Penugasan dapat dilanjutkan kembali, bergantung pada kinerja dari konsultan dan ketersediaan anggaran. Dalam masa penugasannya, beberapa tugas yang harus diselesaikan konsultan, yaitu:

- **Fase I:**

1. Menyusun laporan sementara dari 1 main paper yang berisi masukan, hasil analisis, dan temuan dari hasil diskusi dan kunjungan lapangan; dan
2. Mempersiapkan paparan dari laporan sementara.

- **Fase II:**

1. Menyusun laporan akhir dari 1 main paper;
2. Mempersiapkan dan memaparkan draf final dari main paper yang disusun; dan
3. Menyusun laporan kegiatan konsultan senior.

F. PERKIRAAN BIAYA DAN JADWAL PEMBAYARAN

Kegiatan ini akan dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) melalui kegiatan hibah PFM-MDTF III – TF0B5420, yang dicantumkan dalam DIPA Bappenas Tahun 2023. Perkiraan biaya kegiatannya ini adalah Rp.125.000.000,-.

Kontrak	Tanda Tangan Kontrak	Selesai Kontrak	Jadwal Pembayaran		Total
			Fase I	Fase II	
Konsultan Senior Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan terkait Program Penanganan Stunting	November 2023	Desember 2023	70.000.000	55.000.000	125.000.000

Catatan:

- Fase I berakhir pada November 2023
- Fase II berakhir pada Desember 2023

G. PELAPORAN

Konsultan akan bekerja sama dengan tim dari unit kerja Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Bappenas, serta bekerja dibawah supervisi dari Ketua Tim Teknis PIU Komponen 2, Sub Komponen 1, Bappenas. Selain itu, tim teknis PIU juga akan berkoordinasi dengan Tim Bank Dunia selama pelaksanaan kegiatan, sehingga konsultan diharap untuk berpartisipasi dan membantu mempersiapkan tanggapan, jika diperlukan.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dukungan Manajemen II Setmen PPN/
Settama Bappenas



Karyoto
NIP. 19740707 199802 1 001